

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi menjadikan perluasan ekonomi menjadi merambak maju dalam hal ini menjadikan penggajian menjadi hal yang cukup rentan dan merupakan salah satu aspek penting yang dihadapi oleh sebuah instansi pemerintahan. Kualitas sumber daya manusia sebagai pegawai merupakan modal dasar dalam mencapai tujuan instansi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Perusahaan atau instansi pemerintah selalu berupaya untuk memberi kesejahteraan bagi karyawan atau pegawainya, sehingga karyawan atau pegawai tersebut akan berusaha maksimal memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang direkrut perusahaan atau instansi pemerintahan harus bekerja secara profesional dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Instansi pemerintahan memberikan imbalan kontribusi kepada pegawai atas kontribusi yang dilakukannya untuk instansi dapat berupa gaji. (Aferiaman, 2019).

Gaji merupakan pembayaran atas jasa yang umumnya diberikan secara tetap setiap bulan oleh karyawan administrasi atau manajer (Mulyadi, 2014:373). Melalui PP No 95 Tahun 2018 implementasi sistem berpedoman elektronik untuk pelayanan kepada masyarakat. Dalam aspek ini DPMPTSP Kabupaten Buleleng menjadi instansi pemerintahan yang pengelolaan penggajiannya sudah dapat memanfaatkan

teknologi informasi perangkat daerah sesuai dengan peraturan yang dikemukakan tersebut.

Setiap organisasi pemerintahan harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai landasan keteraturan dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi, dan kepastian hukum bagi pegawai dalam setiap pelaksanaan tugasnya. SOP secara internal merupakan dokumen yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan jabatan dan ketidakpastian dalam tugas dan wewenang yang diberikan. SOP dilihat dari sisi eksternal akan menyediakan kemsejahteraan dan ketegasan bagi penggunaan jasa perlindungan (pegawai). Dengan diterbitkan dan diterapkannya SOP secara positif, nanti pegawai akan lebih gamblang menaksir atas kapan pegawai bisa menerima Surat Keputusan (SK), kenaikan gaji tambahan, kapan akan diterimanya SK Purnabakti dan lain sebagainya (Andi, 2015).

Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang bertanggung jawab dalam berkontribusi membantu bupati dibidang merumuskan kebijakan permodalan dan lindungan administrasi perizinan. Berdasarkan pengamatan awal, selama ini penanganan pengelolaan gaji pegawai DPMPTSP Kabupaten Buleleng telah memanfaatkan teknologi informasi, dengan penerapan pengelolaan keuangan daerah yang sudah terkomputerisasi. Sistem informasi yang dijalankan di lembaga DPMPTSP Kabupaten Buleleng adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Dimana SIPD berisikan bentuk metode pembangunan daerah, skema keuangan daerah, beserta sistem pemeliharaan dan pengamatan pemerintah daerah.

Proses pembayaran gaji pegawai Lembaga DPMPTSP Kabupaten Buleleng menetapkan dasar pencatatan waktu kehadiran dalam kegiatan pembayaran gaji.

Dengan semua yang sudah serba digital kini dalam proses pencatatan waktu kehadiran pada DPMPTSP menggunakan peranan sebuah sistem aplikasi G-Absen. Aplikasi G-absen merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk memetakan absensi pegawai dengan mendeteksi wajah. Aplikasi tersebut diterapkan untuk menjamin ketertiban dan kelancaram dalam realisasi tugas pokok dan fungsi serta diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan serta tanggung jawab dari PNS.

Pegawai Negeri Sipil disebutkan pada UU Kepegawaian No 43 Tahun 1999 dalam Dalil 1 Ayat 1 ialah seorang penduduk Indonesia yang kompeten, diangkat oleh pemerintah yang berwenang, dan menduduki jabatan negeri, dengan digaji berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang tepat. Untuk menyerap mengenai penetapan penggajian PNS terlebih dahulu harus memperhitungkan kreativitas kinerja, posisi, jabatan, waktu kerja dan perporma kerja yang disumbangkan oleh pegawai tersebut untuk instansi. Dengan demikian maka diperlukan sistem penggajian yang terkoordinasi, efektif dan efisien (Iis Nurlis Setyowati dan Maulida, 2019).

Sejalan dengan berkembangnya digitalisasi yang semakin moderen, hampir setiap perusahaan serta instansi pemerintahan menerapkan sistem komputerisasi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang terjadi dalam sistem pembayaran gaji. Sistem akuntansi penggajian yakni gabungan dari formulir, catatan dan laporan pembayaran atas kinerja seorang pegawai yang dibayarkan secara rutin setiap bulan. Penggunaan praktik akuntansi penggajian yang berbasis komputer dalam mengelola semua aktivitas penggajian diharapkan mampu memberikan

informasi yang cepat, tepat, dan juga benar sehingga dapat memudahkan pekerjaan pada bagian keuangan dan kepegawaian (Nila Dera Prisna, 2022).

Sistem akuntansi penggajian dirancang untuk mempermudah dalam proses mencatat, mengelola, dan menganalisis, serta memberitahukan perundingan keuangan dengan aktualisasi yang sah seperti slip kenaikan gaji, serta pelunasan gaji yang kemudian dimasukkan dalam jurnal tembus pada pelaporan keuangan. Penerapan sistem akuntansi penggajian pada perusahaan atau instansi pemerintah sangat penting untuk diterapkan terlebih lagi yang kusus menangani pengurusan keuangan (Amalia & Zuhendra, 2022).

Setelah pengamatan awal dan diskusi yang telah dilaksanakan dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan di DPMTSP Kabupaten Buleleng, bahwa pada sistem penggajian terdapat kendala terkait dengan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus dalam proses penggajian, sehingga dinilai perlu adanya penanganan kusus untuk menghindari terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil. Beralaskan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk menmpershitungkan dan mempelajari lebih rinci terkait sistem akuntansi penggajian Pegawai Negeri Sipil pada DPMTSP Kabupaten Buleleng. Maka dari itu, peneliti tergiring melaksanakan penelitian dengan judul **“Sistem Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan pertimbangan tersebut, maka diidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) kusus

dalam proses penggajian di DPMPTSP Kabupaten Buleleng yang sangat berpengaruh terhadap tidak adanya kepastian hukum bagi pegawai dalam setiap pelaksanaan tugasnya, secara tidak langsung hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pengendalian intern.

1.3 Batasan Masalah

Batasan permasalahan pada penelitian ini terpusat pada sistem akuntansi penggajian Pegawai Negeri Sipil termasuk didalamnya mencakup bagian-bagian yang terikat dalam pembentukan sistem yakni dokumen yang dipakai, catatan akuntansi yang diperlukan, fungsi yang terikat, pengendalian intern dan jaringan prosedur penyusunan prosedur akuntansi penggajian Pegawai Negeri Sipil.

1.4 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian pertimbangan yang dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem akuntansi penggajian pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana prosedur penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sistem akuntansi atas pembayaran gaji untuk meningkatkan pengendalian intern pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, target yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk menjelaskan penerapan Sistem Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
2. Untuk menjelaskan prosedur penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sistem akuntansi penggajian untuk meningkatkan pengendalian intern pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini menjadikan peluang yang berguna dalam pengimplementasian wawasan yang didapatkan di bangku perkuliahan mengenai Sistem Akuntansi Penggajian.
2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha
Penelitian ini diperlukan untuk tambahan referensi bagi pihak terkait maupun peneliti selanjutnya, maka dari itu pengaruh dari penelitian ini bisa digunakan semacam informasi dan analogi pertimbangan bagi mahasiswa dalam menyusun tugas akhir.
3. Bagi DPMPTSP Kabupaten Buleleng.
Penelitian diharapkan mampu dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan mengenai penerapan sistem akuntansi penggajian Pegawai Negeri Sipil